

BAB I

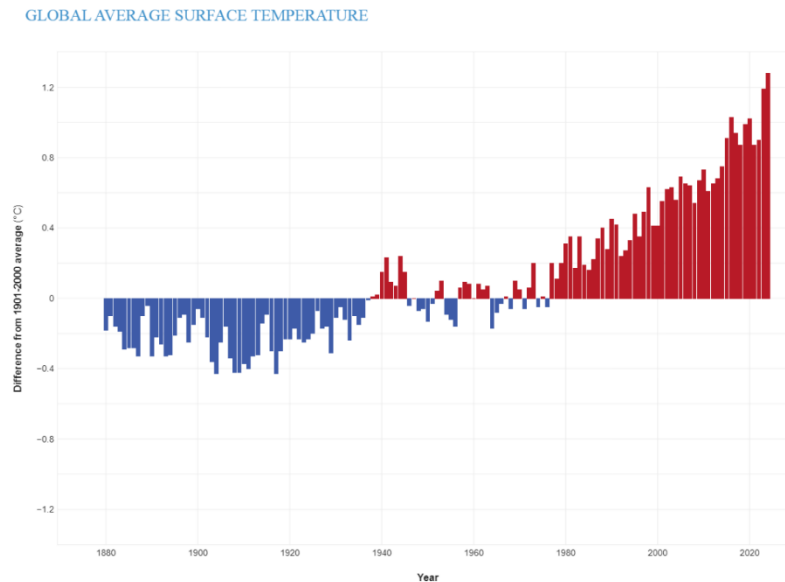
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia, mulai dari kenaikan suhu global, fenomena cuaca ekstrem, hingga naiknya permukaan laut. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan saja namun juga pada ketahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini dikarenakan perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi suatu negara yang kemudian menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dampak ini dapat dirasakan oleh berbagai negara karena perubahan iklim merupakan masalah lintas batas yang tidak dapat diatasi oleh satu negara saja (Widiastuti, 2023). Sederhananya, perubahan iklim adalah pergeseran jangka panjang pada pola cuaca dan suhu bumi.

Secara alami, iklim memang bisa berubah, misalnya akibat variasi siklus matahari. Namun sejak awal Revolusi Industri pada tahun 1800-an, aktivitas manusia justru menjadi faktor utama yang mempercepat perubahan iklim. Penyebab utamanya adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Proses ini menghasilkan gas rumah kaca yang berfungsi layaknya selimut tebal yang menahan panas matahari di atmosfer, sehingga suhu bumi terus meningkat. Karbon dioksida dan metana adalah dua contoh gas utama yang memicu krisis iklim. Sumbernya beragam, mulai dari bensin untuk kendaraan, batu bara untuk listrik dan pemanas gedung, pembukaan lahan dan hutan, hingga tumpukan sampah yang mengeluarkan metana. Sektor energi, transportasi, industri, pertanian,

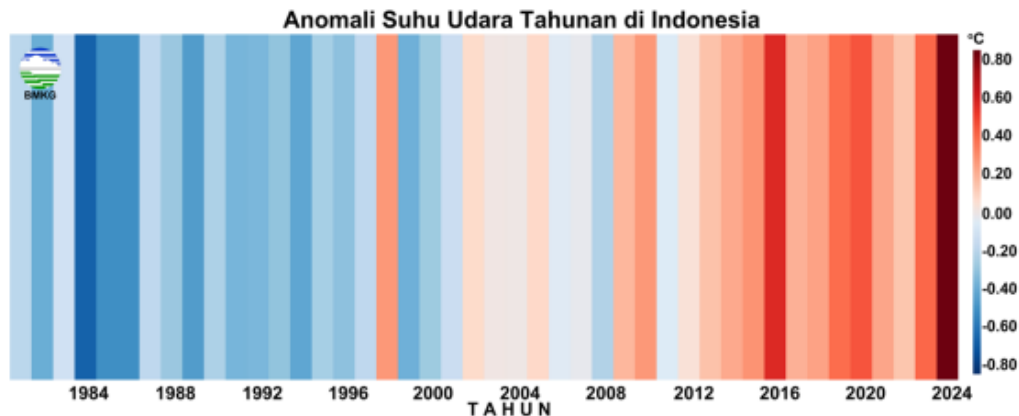
bangunan, serta tata guna lahan tercatat sebagai kontributor terbesar emisi ini (United Nations Indonesia, 2025).



Gambar 1.1 Grafik suhu permukaan tahunan dari tahun 1880-2024

Sumber: *National Center for Environmental Information*

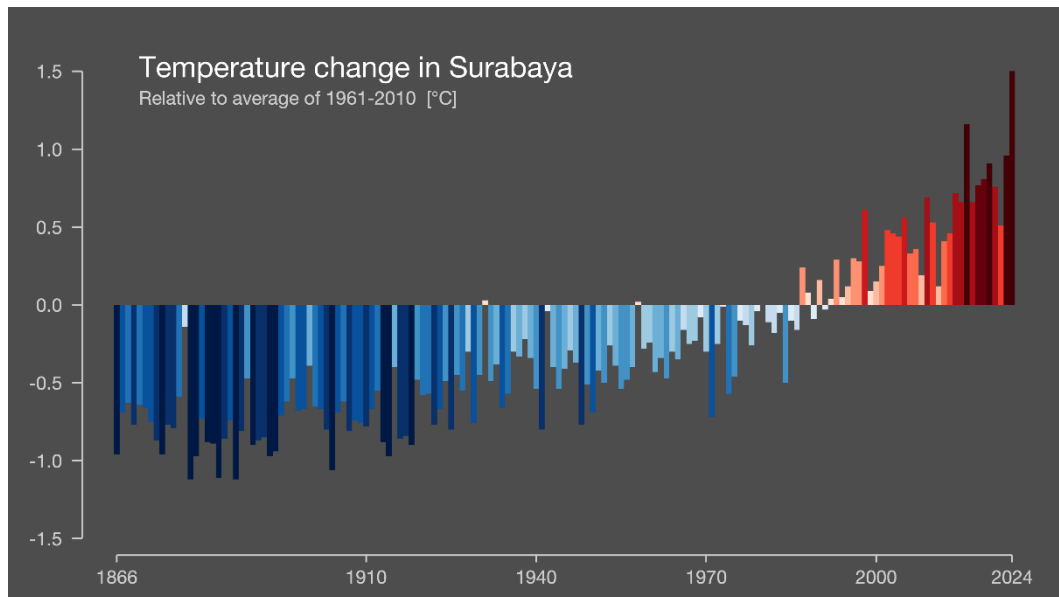
Berdasarkan laporan tahunan NOAA *National Centers for Environmental Information*, tahun 2024 tercatat sebagai tahun paling panas sejak pengukuran suhu global dimulai pada 1850. Rata-rata suhu permukaan bumi naik 2,32°F (1,29°C) dibanding rata-rata abad ke-20, dan 2,63°F (1,46°C) lebih tinggi dari rata-rata masa pra-industri (periode 1850–1900). Tahun 2024 bahkan memecahkan rekor tahun 2023, dengan suhu 0,18°F (0,10°C) lebih panas. Dari seluruh catatan 175 tahun terakhir, sepuluh tahun terpanas semuanya terjadi dalam dekade 2015–2024 (Lindsey & Dahlman, 2025).



Gambar 1.2 Data Anomali Suhu Udara Rata-Rata di Indonesia (1981-2024)

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia telah melakukan pengamatan suhu sejak 1981-2024 yang mencatat bahwa Indonesia telah mengalami tren peningkatan suhu udara yang konsisten. Berdasarkan data anomali suhu udara tahunan periode 1981-2024 (Gambar 1.2) terlihat perubahan warna yang semakin dominan ke arah merah yang menandakan terjadinya peningkatan suhu di atas rata-rata. Dalam konteks data *warming stripes*, warna biru menunjukkan suhu lebih dingin dari rata-rata normal sementara warna merah menandakan tahun-tahun dengan suhu lebih panas. Sejarah pengamatan suhu di Indonesia sejak 1981 mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas dengan anomali sebesar $0,8^{\circ}\text{C}$ melampaui tahun 2016 dengan anomali $0,6^{\circ}\text{C}$ (BMKG, 2025). Data ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi iklim nasional termasuk meningkatnya risiko kekeringan, perubahan pola curah hujan, hingga terjadinya cuaca ekstrem di berbagai daerah.



Gambar 1.3 Data Perubahan Suhu di Kota Surabaya Tahun 1866-2024
 Sumber: *Berkeley Earth*

Selain dalam skala nasional, peningkatan suhu juga terlihat jelas pada tingkat daerah seperti di Kota Surabaya. Berdasarkan data *warming stripes* yang dirilis oleh *Berkeley Earth* (Gambar 1.3) menunjukkan perubahan suhu rata-rata tahunan di Surabaya mengalami perubahan yang signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Pada periode awal pengamatan (1866-1970) sebagian besar tahun didominasi oleh warna biru yang menandakan suhu rata-rata lebih dingin. Namun dalam dua dekade terakhir (2000-2024), intensitas warna merah semakin kuat dengan anomali hingga mencapai 1,5°C (Berkeley Earth, 2025). Data ini menggambarkan bahwa Kota Surabaya telah mengalami peningkatan suhu yang konsisten dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan potensi semakin memburuknya berbagai permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan seperti peningkatan suhu permukaan, penurunan kualitas udara, hingga bertambahnya frekuensi gelombang panas.

Mengingat besarnya dampak perubahan iklim terhadap keseimbangan energi bumi, kerja sama global menjadi hal yang mutlak dibutuhkan. Salah satu langkah

awal yang menandai keseriusan dunia dalam menghadapi isu lingkungan adalah Konferensi Stockholm di tahun 1972 (Rizqi, 2023). Dari pertemuan ini lahirlah gagasan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” (*Sustainable Development*) serta berdirinya *United Nations Environment Programme* (UNEP). Gagasan tersebut kemudian diperkuat melalui Laporan “*Our Common Future*” (1987) yang disusun oleh Komisi Brundtland (*World Commission on Environment and Development*) (ridi, 2023). Laporan tersebut mendefinisikan tentang pembangunan berkelanjutan sebagai “*meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” (United Nations, 2025a). Laporan ini menjadi fondasi penting yang menegaskan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Pada tahun 1992, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro menghasilkan rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Beberapa tahun kemudian, pada September 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar KTT Milenium yang melahirkan Deklarasi Milenium berisi delapan tujuan utama yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs), dengan target pencapaian hingga tahun 2015. Meski begitu, MDGs menuai kritik karena dianggap terlalu berfokus pada negara berkembang dan kurang menyoroti akar persoalan di negara maju, seperti pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan (ridi, 2023). Pada 25 September 2015, PBB kembali mengadakan konferensi besar yang dihadiri 193 pemimpin dunia dan secara resmi meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan. SDGs dirancang sebagai agenda pembangunan global yang lebih

luas, ambisius, dan mencakup semua negara tanpa terkecuali. (United Nations, 2025)



Gambar 1.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: United Nation

Pada dasarnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dibangun di atas tiga prinsip utama. Pertama, prinsip universalitas, yang menegaskan bahwa agenda ini berlaku bagi semua negara tanpa pengecualian, baik negara maju maupun berkembang. Pendekatan ini menggeser pola pikir lama dari sekadar bantuan pembangunan menjadi bentuk kemitraan global. Kedua, prinsip integralitas, yang menyoroti keterkaitan dan ketergantungan antar-17 tujuan SDGs. Setiap tujuan saling memengaruhi; misalnya, pencapaian Tujuan 13 tentang penanganan perubahan iklim berdampak langsung pada Tujuan 2 tentang penghapusan kelaparan dan Tujuan 6 mengenai akses terhadap air bersih dan sanitasi. Ketiga, prinsip *leave no one behind* menjadi dasar etika dari Agenda 2030, yang menegaskan pentingnya inklusivitas agar setiap kelompok masyarakat, terutama

yang rentan dan terpinggirkan, turut merasakan manfaat pembangunan. (BPK, 2025)

Dari sisi substansi, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memperluas ruang lingkup MDGs dengan menggabungkan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih seimbang dan terpadu (BPK, 2025). SDGs tidak hanya melanjutkan fokus MDGs pada aspek sosial, seperti pengurangan kemiskinan (Tujuan 1) dan peningkatan kesehatan (Tujuan 3), tetapi juga secara tegas menambahkan aspek lingkungan, misalnya tentang pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Tujuan 12), perlindungan ekosistem laut (Tujuan 14) dan daratan (Tujuan 15). Selain itu, SDGs turut memasukkan unsur tata kelola seperti perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Meskipun demikian, pemerintah tetap menunjukkan keseriusan dalam menanggapi tantangan tersebut melalui penyusunan *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dokumen NDC berfungsi sebagai instrumen nasional yang merangkum rencana aksi mitigasi berupa upaya penurunan emisi gas rumah kaca, serta langkah-langkah adaptasi guna meningkatkan daya tahan terhadap risiko perubahan iklim. Pemerintah Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat target penurunan emisi dan mengembangkan kebijakan adaptasi yang selaras dengan upaya global dalam membatasi peningkatan suhu bumi hingga 1,5°C. Secara substansial, NDC Indonesia memuat berbagai strategi mitigasi pada sektor energi, kehutanan, dan tata

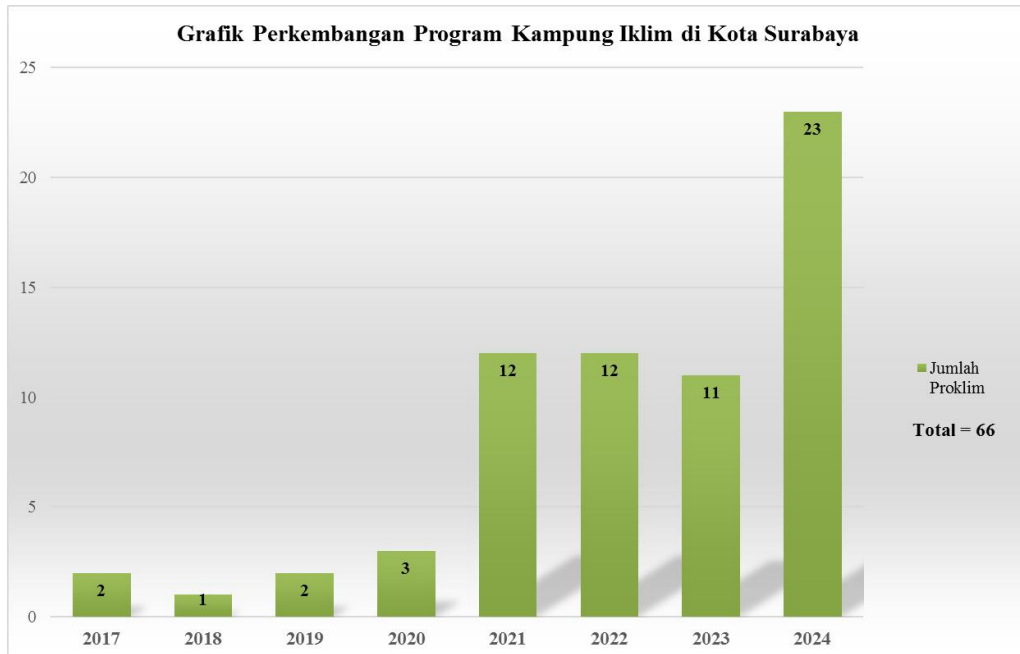
guna lahan, serta kebijakan adaptasi yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan iklim di tingkat nasional. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024)

Sebagai salah satu kebijakan strategis Indonesia dalam memenuhi komitmen nasional maupun global terhadap isu iklim, Program Kampung Iklim (ProKlim) yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran penting sebagai bentuk nyata aksi iklim berbasis komunitas yang terencana dan dapat diukur. Program Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim. Berdasarkan Permen LHK Nomor P.84 Tahun 2016 tersebut, Program Kampung Iklim dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan dalam memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di tingkat lokal. Program ini juga berfungsi sebagai bentuk apresiasi atas berbagai upaya adaptasi dan mitigasi yang telah dijalankan oleh masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, ProKlim menyediakan acuan bagi pemerintah serta pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan pengendalian perubahan iklim. Pelaksanaan ProKlim dilakukan secara komprehensif melalui beragam kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, antara lain pengelolaan sampah secara terpadu, konservasi sumber daya air, peningkatan efisiensi energi, serta penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025)

Salah satu kota di Indonesia yang menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan inovasi lingkungan ialah Kota Surabaya. Komitmen ini terlihat dari berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Kota Surabaya seperti Penghargaan *Indonesia's SDGs Action Awards 2024* serta Penghargaan *Smart Environment* di tahun 2025 (Jatim Newsroom, 2024). Capaian ini merupakan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat Surabaya dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Berbagai program seperti kampung iklim, bank sampah induk, serta revitalisasi taman kota telah menciptakan kota yang lebih hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Surabaya saat ini telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Program Kampung Iklim Di Kota Surabaya. Sebelum peraturan tersebut ditetapkan, pelaksanaan ProKlim di Surabaya masih bersifat internal dengan berpedoman pada kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada periode tersebut, ProKlim umumnya dijalankan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Instruksi Kepala Daerah, serta diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Aksi Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tanpa adanya peraturan wali kota yang secara khusus mengatur pelaksanaannya. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya telah mulai mendaftarkan sejumlah kampung untuk berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menunjukkan bahwa

jumlah kampung yang terlibat dalam program tersebut mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun tersebut.



Gambar 1.5 Grafik Perkembangan Program Kampung Iklim di Kota Surabaya tahun 2017-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun-tahun awal pelaksanaan, jumlah kampung di Kota Surabaya yang mengikuti Program Kampung Iklim masih sangat sedikit yang mana hanya 1-3 kampung saja. Namun, sejak tahun 2021, partisipasi masyarakat terhadap program ini mulai menunjukkan peningkatan pesat hingga mencapai jumlah tertinggi yakni pada tahun 2024 yang diikuti sebanyak 23 kampung. Total kampung yang berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim hingga tahun 2024 adalah sebanyak 66 kampung. Data jumlah kampung yang mengikuti Program Kampung Iklim ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat kota Surabaya dalam mengimplementasikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. Data ini juga menunjukkan

komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan yang partisipatis dan berkelanjutan.

Tabel 1.1 Data Wilayah Partisipasi Program Kampung Iklim Kota Surabaya Tahun 2024

No.	Nama Kampung/ RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Kategori
1.	RW 1, 2, 3, 4	Pagesangan	Jambangan	Lestari
2.	RW 1	Banjar Sugihan	Bubutan	Lestari
3.	RW 5	Bubutan	Bubutan	Utama
4.	RW 11	Karah	Jambangan	Utama
5.	RW 5	Medokan Ayu	Rungkut	Utama
6.	RW 8	Kedurus	Karang Pilang	Utama
7.	RW 6	Sidotopo Wetan	Kenjeran	Utama
8.	RW 4	Bangkingan	Lakarsantri	Utama
9.	RW 7	Keputih	Sukolilo	Utama
10.	RW 8	Semolowaru	Sukolilo	Utama
11.	RW 5	Semolowaru	Sukolilo	Utama
12.	RW 11	Bendul Merisi	Wonocolo	Utama
13.	RW 2	Sumur Welut	Lakarsantri	Utama
14.	RW 14	Babat Jerawat	Pakal	Utama
15.	RW 7	Babat Jerawat	Pakal	Utama
16.	RW 7	Sambikerep	Sambikerep	Utama
17.	RW 9	Banyu Urip	Sawahan	Utama
18.	RW 3	Simomulyo Baru	Sukomanunggal	Utama
19.	RW 1	Manukan Kulon	Tandes	Utama
20.	RW 6	Babatan	Wiyung	Utama
21.	RW 5	Balas Klumprik	Wiyung	Utama
22.	RW 7	Sememi	Benowo	Utama
23.	RW 6	Bubutan	Bubutan	Utama

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Pada tahun 2024, sebanyak 23 kampung di Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari jumlah tersebut, dua kampung yakni Kelurahan Pagesangan dan RW 1 Banjar Sugihan telah berhasil memperoleh

penghargaan dengan kategori tertinggi yaitu ProKlim Lestari. Kedua wilayah ini dinilai sukses menjalankan berbagai inovasi lingkungan yang tidak hanya memperbaiki kualitas ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga. (Jatim Newsroom, 2024)

Penilaian kategori ini bukan hanya semata-mata label administratif, melainkan melalui penilaian kualitas, relevansi, hingga keberlanjutan dari kegiatan adaptasi dan mitigasi. Ada empat (4) kategori atau tingkatan ProKlim yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim yaitu antara lain 1) ProKlim Pratama merupakan kategori awal dalam penilaian Program Kampung Iklim yang jenis kegiatannya masih terbatas dengan dampak kegiatan yang belum luas; 2) ProKlim Madya merupakan kategori lanjutan yang menunjukkan peningkatan kualitas dan cakupan pelaksanaan ProKlim yang ditandai dengan mulai terbentuknya dukungan kebijakan lokal dan jejaring kerja sama; 3) ProKlim Utama merupakan kategori kampung yang dinilai telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi secara komprehensif dan efektif didukung oleh kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri; dan 4) ProKlim Lestari merupakan kategori kampung yang mampu menunjukkan keberlanjutan serta pengembangan kegiatan ProKlim secara konsisten.

Kelurahan Pagesangan sendiri telah memperoleh penghargaan tertinggi yakni ProKlim Lestari. Hal ini didukung oleh kemampuan wilayah Kelurahan Pagesangan dalam melakukan pembinaan terhadap sepuluh (10) lokasi lain yang selanjutnya akan didaftarkan sebagai Kampung Iklim. Kelurahan ini berpartisipasi

dalam kegiatan Program Kampung Iklim berbekal dari adanya masalah dalam kondisi lingkungan wilayah ini yang merupakan langganan mengalami banjir terutama di sebagian wilayah RW 1, RW 2, dan RW 3. Selain itu, banyak sampah yang menyumbat aliran sungai dikarenakan banyak rumah yang membelakangi sungai. Berangkat dari permasalahan tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan pun mengusulkan Kelurahan Pagesangan untuk mengikuti Program Kampung Iklim.



Gambar 1.6 Sistem Pompa Pengendali Banjir (Polder)

Sumber: Dokumentasi Narasumber

Kelurahan Pagesangan telah melaksanakan beragam upaya adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim. Bentuk adaptasi yang dilakukan mencakup pemanenan air hujan melalui penggunaan Penampung Air Hujan (PAH) serta kolam atau lubang penampungan air. Selain itu, upaya peningkatan daya serap air tanah dilakukan dengan penerapan biopori, sumur resapan, dan rorak. Penghematan air juga menjadi perhatian melalui pemanfaatan air hasil IPAL, air cucian beras, serta air kondensasi dari pendingin ruangan untuk penyiraman tanaman. Dalam rangka pengendalian risiko banjir, kelurahan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti sistem pompa pengendali banjir (polder)

serta sistem peringatan dini banjir. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat turut dikembangkan melalui inovasi pengolahan pangan dan minuman berbahan alami yang tersedia di wilayah setempat, seperti produksi minuman temulawak dan olahan kue berbahan mangga. Di sisi lain, upaya pengendalian penyakit yang berkaitan dengan iklim dilakukan melalui pengendalian vektor, pemeliharaan sanitasi dan ketersediaan air bersih, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat.



Gambar 1.7 Instalansi Pengolahan Air Limbah Jernih dan Aman (IPAL JERAM)

Sumber: Dokumentasi Narasumber

Adapun upaya mitigasi perubahan iklim yang telah diterapkan di Kelurahan Pagesangan meliputi pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair melalui berbagai inovasi, seperti pengembangan bank sampah, lubang sisa dapur (lubisida), serta pengoperasian IPAL JERAM (Jernih dan Aman). Upaya mitigasi sendiri semakin dipermudah berkat berbagai bantuan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui unit operasinya dengan memberikan bantuan seperti alat pencacah daun hingga beberapa kali melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Di sektor energi, kelurahan ini juga menerapkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta upaya konservasi dan

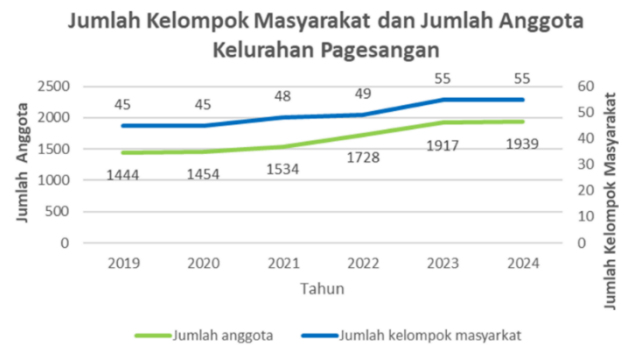
penghematan energi, antara lain melalui penggunaan panel surya dan lampu LED. Selain itu, peningkatan tutupan vegetasi dilakukan melalui kegiatan penghijauan dan pengembangan urban farming. Seiring dengan perkembangan tersebut, Kelurahan Pagesangan kini bertransformasi menjadi ruang pembelajaran lingkungan hidup yang kerap dijadikan lokasi studi banding oleh pelajar maupun masyarakat umum, khususnya untuk mempelajari sistem pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah terpadu. (Jatim Newsroom, 2024)



Gambar 1.8 Data Grafik Luas Area Banjir dan KK Terdampak di Kelurahan Pagesangan Tahun 2017-2024

Sumber: Kelurahan Pagesangan

Berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah dilaksanakan tersebut sangat berdampak pada lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Pada dampak lingkungan sendiri telah banyak perubahan yang terasa terutama menurunnya area terdampak banjir dari tahun ke tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada pada Gambar 1.8 yang menunjukkan grafik luas area banjir dan KK yang terdampak di Kelurahan Pagesangan telah mengalami penurunan yang konsisten terutama setelah mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.



Gambar 1.9 Data Grafik Jumlah Kelompok Masyarakat dan Jumlah Anggota Kelurahan Pagesangan Tahun 2019-2024
Sumber: Kelurahan Pagesangan

Dampak sosial pun terasa setelah mengikuti kegiatan ProKlim ini yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah kelompok masyarakat dan anggota Kelurahan Pagesangan yang bergabung dalam organisasi. Selain itu, dampak ini bisa terlihat dari ketertiban serta inisiatif warga yang cukup terlihat aktif dan mandiri dalam berpartisipasi mengikuti berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi ProKlim. Kelurahan Pagesangan pun telah mendapat berbagai prestasi atas partisipasinya dalam menjaga lingkungan seperti contohnya pada tahun 2022 yang mana Kelurahan Pagesangan berhasil meraih penghargaan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI) kategori Madya.



Gambar 1.10 Data Grafik Aksi Adaptasi dan Mitigasi dengan Pendapatan Warga Tahun 2017-2023
Sumber: Kelurahan Pagesangan

Selain dampak secara lingkungan dan sosial, dampak ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat terasa ialah secara ekonomi. Hal ini terlihat pada Gambar 1.10 yang menunjukkan bahwa anggaran yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ProKlim secara konsisten telah menurun. Sementara pendapatan yang diperoleh masyarakat untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi telah mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun.

Dampak-dampak tersebut telah menunjukkan bahwa kegiatan ProKlim di Kelurahan Pagesangan telah membawa dampak nyata terhadap SDGs Poin 13 (*Climate Change*). Hal ini sesuai dengan poin tersebut yang menekankan keharusan untuk menjamin ketersediaan air bersih serta pangan, penggunaan energi bersih, hingga munculnya manfaat ekonomi dari kegiatan lingkungan. Adanya penurunan area banjir hingga kegiatan pemanfaatan air limbah hasil IPAL dan air kondensasi AC menunjukkan adanya penguatan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim.

Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan berupa inkonsistensi kebijakan antar kementerian yang menciptakan paradoks dalam upaya penanganan perubahan iklim. Di satu sisi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gencar mendorong aksi mitigasi melalui Program Kampung Iklim, namun di sisi lain, terdapat agenda dari kementerian sektoral lain yang mungkin masih memprioritaskan pembukaan lahan atau pembangunan infrastruktur yang berisiko mendegradasi kawasan hijau. Kontradiksi kebijakan ini menempatkan program berbasis komunitas seperti ProKlim pada posisi yang rentan terhadap tekanan kebijakan pusat yang tidak selaras. Oleh karena itu, identifikasi *Critical Success*

Factors (CSF) menjadi sangat krusial dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa inisiatif lokal memiliki landasan strategis dan dukungan politik yang kuat agar tetap bertahan dan efektif di tengah kompleksitas lingkungan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan judul penelitian adalah “***Critical Success Factors (CSF) Pada Program Kampung Iklim Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya***”. Penelitian ini menerapkan pendekatan *Critical Success Factors (CSF)* dengan menyesuaikan faktor-faktor strategis yang dikemukakan oleh John M. Bryson ke dalam konteks organisasi sektor publik. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan program, termasuk aspek kepemimpinan, dukungan pemangku kepentingan, kejelasan visi dan tujuan, kapasitas organisasi, serta keselarasan antara strategi dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai hasil program, tetapi juga menelaah elemen-elemen kunci yang menentukan keberlanjutan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apa saja *Critical Success Factors (CSF)* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan Program Kampung Iklim di Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, terutama peneliti, akademisi, dan masyarakat yang ingin memahami faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Pagesangan, Kota Surabaya, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai Program Kampung Iklim serta kunci yang menjadi faktor keberhasilannya dalam mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat memperluas pengetahuan mengenai isu perubahan iklim ekstrem dan berbagai langkah penanganannya, khususnya melalui program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Program Kampung Iklim. Penelitian ini juga memberi kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam kunci keberhasilan program tersebut dalam mengatasi permasalahan lingkungan

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi independen bagi DLH Surabaya. Temuan terkait faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan, hingga kendala yang dihadapi dapat digunakan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan Program Kampung Iklim di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang akademik, baik sebagai sumber referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang maupun sebagai bahan pengembangan pengetahuan di bidang pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan.